

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus melibatkan tiga unsur elemen penting yaitu masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Interaksi yang terjadi antara ketiga unsur elemen tersebut akan melahirkan kebijakan yang bersifat adil antara semua pihak. Masyarakat berfungsi sebagai pihak yang mengawasi perumusan kebijakan, karena setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan ada indikasinya buat masyarakat. Pihak pemerintah bertugas sebagai pembuat kebijakan dan pihak swasta sebagai pelaku sektor ekonomi. Pada bab ini peneliti membuat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti temukan dilapangan yang telah peneliti bahas di bab sebelumnya.

Melihat dari penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Koto Baru yaitu bentuk tata kelola pemerintahan Nagari Koto Baru dalam perubahan status Nagari dari Nagari maju menjadi Nagari mandiri pada Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status yang terjadi di Nagari Koto Baru dinilai dari tiga indikator yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Indeks ketahanan sosial Nagari Koto Baru menunjukkan bahwa Nagari Koto Baru sudah memiliki segala fasilitas umum dari segi pendidikan hingga kesehatan. Indeks ketahanan ekonomi Nagari Koto Baru juga menunjukkan bahwa masyarakatnya sudah mandiri terhadap ekonomi. Indeks ketahanan ekologi Nagari Koto Baru menunjukkan bahwasanya Nagari Koto Baru memiliki potensi bencana alam yang minim serta untuk penanggulangan bencana sudah bagus.

Namun perubahan status yang terjadi tidak hanya dinilai dari tiga indikator tersebut, tetapi juga dilihat dari bentuk tata kelola pemerintahan Nagari. Dinilai dari prinsip akuntabilitas, Nagari Koto Baru menunjukkan bahwasanya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan baik kepada masyarakat maupun kepada perangkat Nagari sudah berjalan dengan baik. Perangkat-perangkat Nagari sudah melakukan komitmen dan bekerja secara jujur, obyektif, dan mampu menunjukkan sifat profesionalitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dilihat dari bentuk transparansi yang ada di Nagari Koto Baru, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk transparansi yang terjadi di Nagari Koto Baru secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik namun belum berjalan secara optimal. Hal itu bisa dilihat dari penggunaan media sosial yang belum efektif dan Nagari Koto Baru tidak memiliki *website* Nagari yang aktif. Padahal Perbup sudah menginstruksikan bahwasanya setiap Nagari harus memiliki *website* Nagari. Namun jika dilihat dari segi laporan keuangan, Nagari Koto Baru sudah berjalan dengan baik.

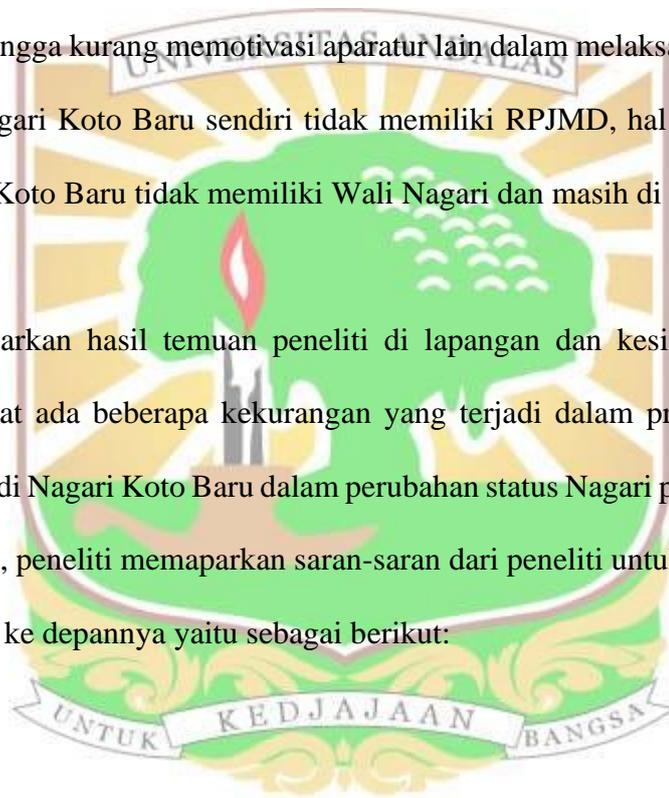
Jika dilihat dari segi partisipasi masyarakat, Nagari Koto Baru sudah menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan optimal. Masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan serta dalam pembuatan keputusan. Kemudian, lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat di Nagari Koto Baru secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif. Kemudian, untuk pelayanan, Nagari Koto Baru sudah memberikan pelayanan via online yaitu nama programnya adalah Pelayanan Berbasis WA (Pandawa).

Kemudian jika dilihat dari aturan hukum, Nagari Koto Baru sudah menerapkan regulasi-regulasi yang berlaku baik dari Permendagri maupun dari

Perbup. Aturan-aturan yang telah dibuat dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Hal itu guna adanya kepastian hukum yang berlaku, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan layanan dari pemerintahan Nagari jika ada perangkat-perangkat Nagari yang melanggar aturan maka akan diberikan sanksi oleh pemerintahan Nagari Koto Baru. Namun penghargaan yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari terhadap perangkatnya yang sudah melakukan tugas dengan baik hanya berupa ucapan lisan dan penyampaian apresiasi. Sehingga kurang memotivasi aparat lain dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian Nagari Koto Baru sendiri tidak memiliki RPJMD, hal itu dikarenakan status Nagari Koto Baru tidak memiliki Wali Nagari dan masih di PJ-kan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dan kesimpulan di atas. Peneliti melihat ada beberapa kekurangan yang terjadi dalam proses tata kelola pemerintahan di Nagari Koto Baru dalam perubahan status Nagari pada Tahun 2022. Oleh sebab itu, peneliti memaparkan saran-saran dari peneliti untuk menjadi acuan dan perbaikan ke depannya yaitu sebagai berikut:



1. Peneliti melihat bahwa Nagari Koto Baru sebagai Nagari yang berstatus Nagari Mandiri masih memiliki beberapa kendala dari sektor penunjang perekonomian masyarakatnya yaitu jalan-jalan di pasar yang rusak dan sampah yang berserakan sehingga mengakibatkan kemacetan dan kerusakan lingkungan. Peneliti berharap jalan yang rusak dan masalah lingkungan bisa segera diatasi oleh pemerintahan Nagari Koto Baru.
2. Secara keseluruhan bentuk transparansi yang terjadi di Nagari Koto Baru sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui media internet apalagi kita sekarang hidup di dunia yang serba cepat. Oleh sebab itu, peneliti berharap penyebaran informasi di internet dan media sosial bisa dilakukan secara optimal dan *website* Nagari kembali diaktifkan.
3. Pemberian hadiah atau *reward* kepada perangkat-perangkat Nagari harus segera dilaksanakan secara formal. Hal itu guna untuk mendorong semangat kerja dari perangkat-perangkat lainnya. Hal tersebut juga bisa memotivasi perangkat yang lain.

